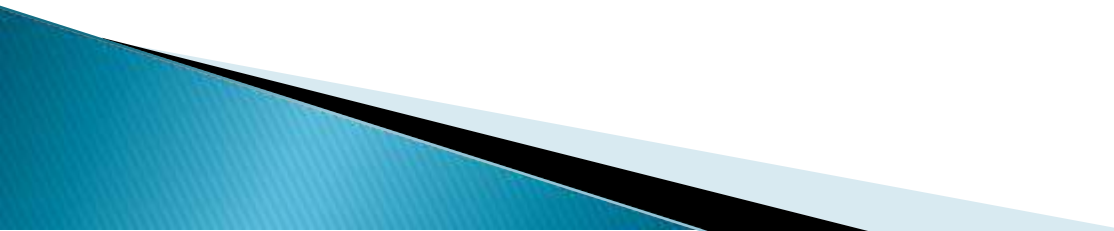


CATATAN DAN MASUKAN, SEBAGAI BAHAN REKOMENDASI DPRD DIY TERHADAP LKPJ GUBERNUR 2018

DRS. MA'SUM AMRULLAH., MM
TAF PERSATUAN DEMOKRAT

A. Pendahuluan.

- ▶ LKPJ GUBERNUR 2018, AGENDA ADMISTRASI TAHUNAN, BERSIFAT RUTIN TEKNIS & BERKESINAMBUNGAN;
 - ▶ LKPJ 2018, MASIH ADA KETERHUBUNGAN DG LKPJ 2017;
 - ▶ KITA BERHARAP, AGENDA RUTIN INI, TIDAK MENIMBULKAN KEJENUHAN & DIHARAPKAN SELALU ADA INOVASI BARU;
 - ▶ KITA BERHARAP *DATA YG TERTERA* DLM LAPORAN *LKPJ 2018* ADALAH BENAR DAN SESUAI FAKTA DAN MENJADI RUJUKAN RESMI;
 - ▶ SECARA UMUM, KITA MENGAPRESIASI LKPJ 2018 SUDAH SEJALAN DG HARAPAN MASYARAKAT DIY.
- 

PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:

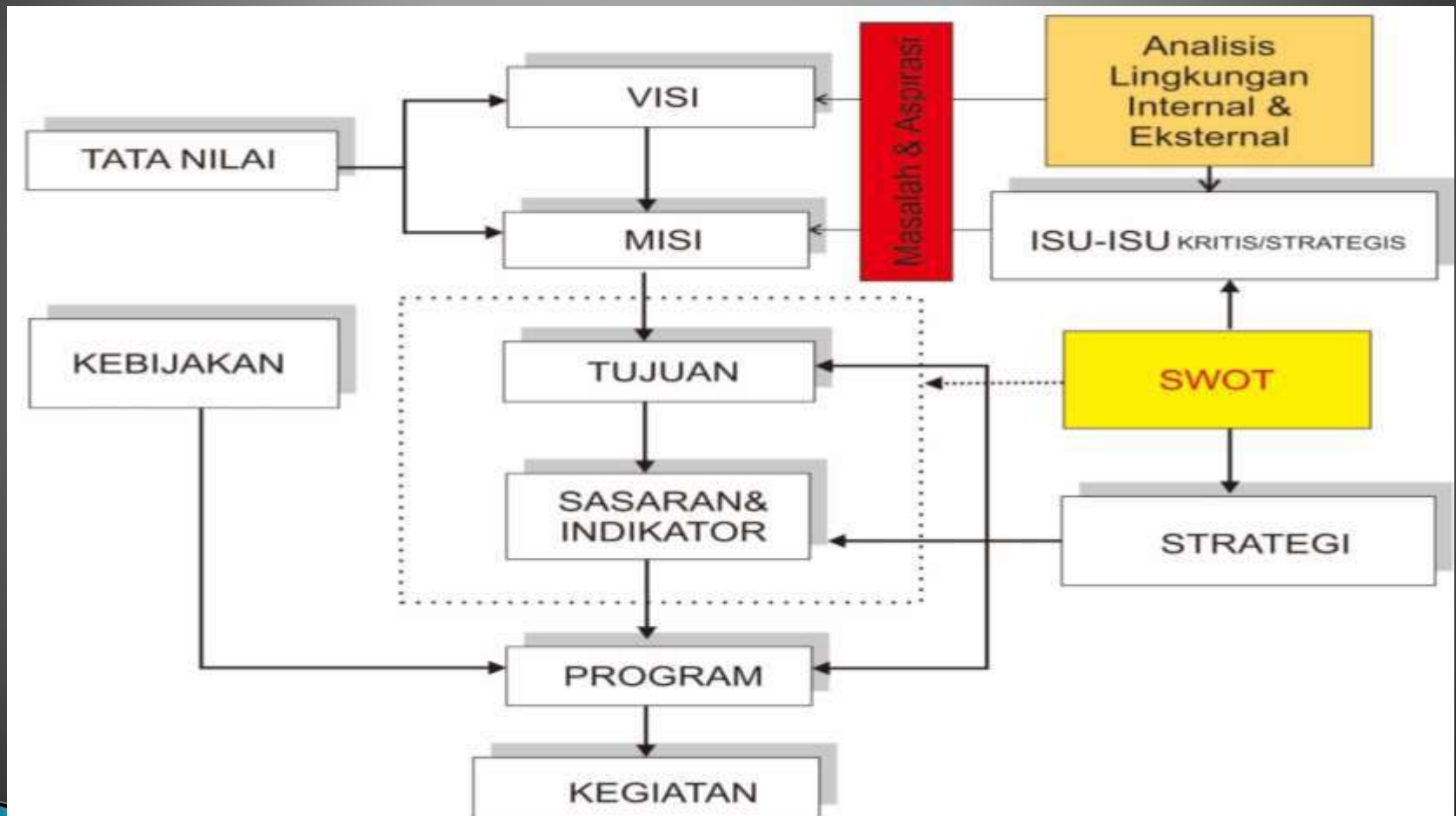
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.



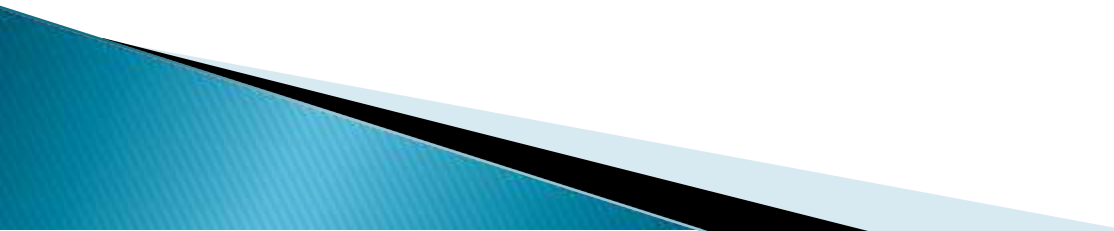
Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

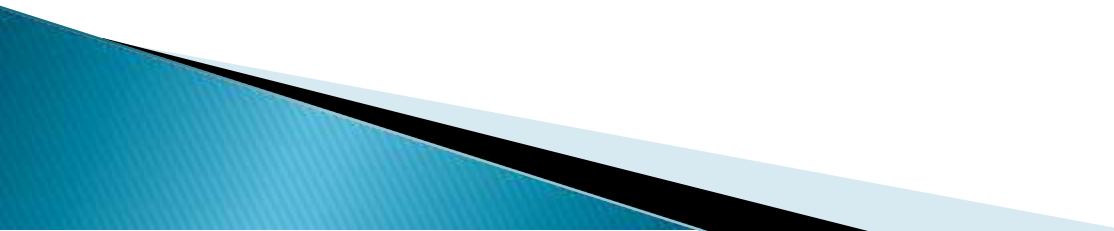
PROSES PERENCANAAN STRATEGIS



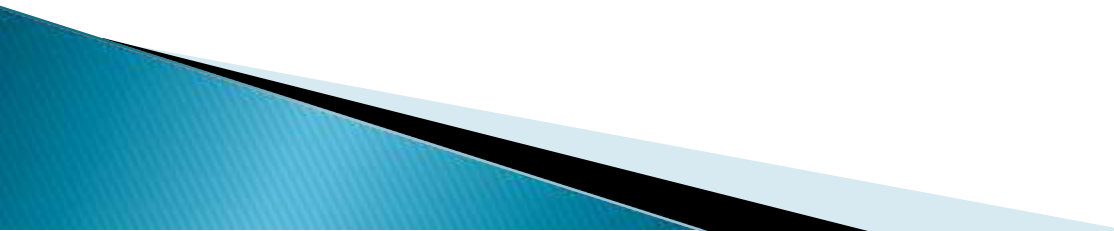
Batasan: Permasalahan menurut Permendagri 86/2017

- ▶ **Isu Strategis** adalah situasi dan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah, karena dampaknya signifikan bagi Daerah dengan karakteristik yang bersifat : penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah atau panjang. Sangat menentukan Bagi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, di masa yang akan datang. @ (Dr.Retno Widodo RKPD 2019)
- 

B. CATATAN UNTUK LKPJ 2018

- ▶ SEKTOR ATAU URUSAN YG BELUM MENCAPAI TARGET, PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN LEBIH SERIUS DARI SELURUH KOMPONEN TERKAIT;
 - ▶ BUKAN MERAGUKAN DATA STATISTIK YG ADA, TAPI SIKAP KEHATI-HATIAN DAN UP DATE DATA HARUS MENJADI KENISCAYAAN: *Evaluasi dan Koreksi*.
 - ▶ SEKTOR2 YG SUDAH MENCAPAI TARGET, TIDAK PERLU LAGI KITA DIBAHAS.
 - ▶ 4 ISSUE UTAMA (**IPM, INDEKS GINI, ANGKA KEMISKINAN, INDEKS WILLIAMSON**) YG BELUM MENCAPAI TARGET, HARUS MENDAPAT PERHATIAN KHUSUS & SERIUS DARI DPRD DIY.
- 

Lanjutan:

- ▶ **FOCUS PEMBANGUNAN SUDAH HARUS BERALIHKAN PADA SEKTOR YG MEMBUTUHKAN PERHATIAN LEBIH.**
 - ▶ **8 SEKTOR PRIORITAS 2018, PERLU KAJIAN**
 - ▶ **RASIO GINI/ KETIMPANGAN PENDAPATAN (0,422), Masih Tetap Menjadi domain Pemda DIY, mengingat angka Kemiskinan Masih Cukup Tinggi (11,81%).**
 - ▶ **TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) 3,35 % DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) 73,37%, PERLU PERHATIAN SERIUS.**
- 

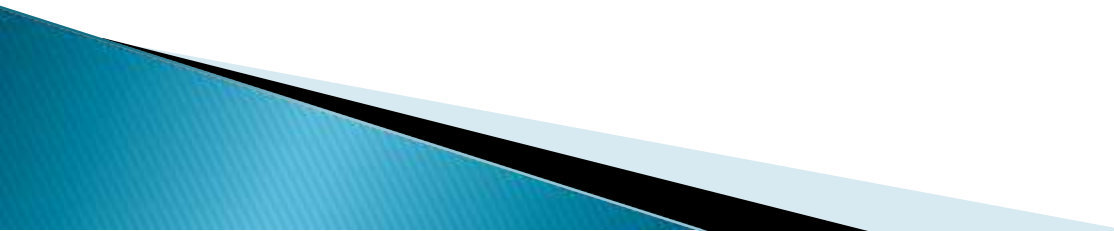
Lanjutan:

- ▶ MENEKAN KETIMPANGAN RASIO GINI (0,422) MENJADI KENISCAYAAN.
- ▶ ISSUE KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH (0,4641), MASIH MENJADI *ISSUE SEKSI*. PEMDA DIY, DLM HAL INI BAPPEDA, Sudah harus merumuskan Konsep baru sebagai *SOLUSI* untuk menekan Ketimpangan antar Wilayah.
- ▶ REFORMASI BIROKRASI TERUS DIDORONG, AGAR EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA BIROKRASI DAPAT TERKONDISI SESUAI HARAPAN.
- ▶ KEISTIMEWAAN DIY, PERLU TERUS DIDORONG IMPLEMENTASINYA. TIDAK BERHENTI PADA LABEL, TAPI SPIRIT DAN KONTENSINYA HARUS MENYATU DALAM DINAMIKA MASYARAKAT@

C. MASUKAN UNTUK DPRD DIY

- ▶ RPJPD DAN RPJMD DIY, SBG PEDOMAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH, PERLU PENGAWALAN DALAM RANGKA MENJAGA KONSISTENSI PEMBANGUNAN DAERAH;
- ▶ KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI APBD, MENJADI DOMAIN UTAMA DEWAN, KHUSUSNYA DALAM ASPEK PENGAWASAN.
- ▶ APBD 2018—RELATIF BERHASIL-- DG BEBERAPA CATATAN.
- ▶ KETERHUBUNGAN APBD 2018 DG RPJMD 2017-2022, HARUS MENJADI FOCUS UTAMA DEWAN. MENINGAT APBD 2018 SBG *STARTING POINT*, ATAU AWAL PELAKSANAAN RPJMD IV.

LANJUTAN:

- ▶ CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD DIY, SEBAIKNYA DI TINDAKLANJUTI, PADA SAAT PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 2019. DAN TIDAK HARUS MENUNGGU TAHUN ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA.
 - ▶ TERUTAMA EMPAT (4) ISSUE UTAMA YG BELUM MENCAPAI TARGET, SANGAT LAYAK MENJADI SKALA PRIORITAS UTK DIBAHAS DLM APBD PERUBAHAN 2019.
- 

D. PENUTUP

▶ TERIMA KASIH